



**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2016**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016

B. Gambaran Umum Daerah

Posisi Kabupaten Ciamis terletak di ujung tenggara Provinsi Jawa Barat dengan rentang kendali ke Ibukota Provinsi sekitar 121 Km, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 143.387 Ha (1.433,87 Km²) atau 7,73% dari luas daratan wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Ciamis terdiri dari 27 Kecamatan, 258 Desa dan 7 Kelurahan, 1.225 Dusun, 2.920 RW dan 9.151 RT dengan jumlah penduduk sampai akhir bulan Desember 2016 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sebanyak 1.398.346 orang, terdiri dari 702.065 orang laki-laki dan 696.281 orang perempuan dengan kepadatan penduduk 975,23 jiwa/Km² dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2016 sebesar 0,46%.

Berkenaan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun ini, kami informasikan bahwa sehubungan adanya penghitungan metode baru dan perubahan tahun dasar, maka capaiannya disajikan dalam dua versi.

Penghitungan metode baru didasari oleh indeks parsial pembentuk IPM yaitu Indeks Pendidikan yang dihitung berdasarkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Kesehatan dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH), serta Indeks Pengeluaran dihitung berdasarkan Daya Beli Masyarakat dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sedangkan berdasarkan penghitungan metode lama, indeks pembentuk IPM untuk Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Kesehatan berdasarkan Angka Harapan Hidup serta Indeks Daya Beli Masyarakat dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM dan PDRB karena beberapa indikator sudah tidak tepat digunakan dalam penghitungan IPM, seperti Angka Melek Huruf (AMH) dimana AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Adapun penghitungan IPM metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik, dimana dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi serta PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 berdasarkan penghitungan metode baru mencapai sebesar 68,40 yang didukung oleh beberapa komponen IPM antara lain indeks pendidikan sebesar 63,13, indeks kesehatan sebesar 79,28 dan indeks pengeluaran sebesar 64,74. Selanjutnya penghitungan IPM berdasarkan metode lama mencapai sebesar 74,05 yang didukung oleh beberapa komponen IPM yaitu Indeks pendidikan mencapai 84,84 dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,36 tahun dan Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 99,39%. Selain itu didukung pula oleh Indeks Kesehatan yaitu sebesar 71,87 dan Indeks daya beli masyarakat Kabupaten Ciamis sebesar 65,46.

C. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Ciamis memiliki beberapa potensi unggulan, antara lain potensi sumber daya air; potensi pertanian melalui komoditi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; potensi kehutanan; potensi pertambangan; potensi kepariwisataan serta potensi industri dan perdagangan.

Berkenaan dengan potensi sumber daya air khususnya air baku permukaan, mengalir dari Sungai Citanduy sepanjang 180,33 Km dengan debit air rata-rata 38,04 m³/detik dan debit normal 1.203 m³/detik. Keberadaan Sungai Citanduy didukung pula oleh beberapa anak sungai yang potensinya cukup besar yaitu Sungai Cijolang, Cimuntur dan Ciseel yang pemanfaatannya dapat digunakan untuk pengairan/irigasi dan air bersih, dijadikan sebagai potensi pembangunan bendungan atau dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Adapun salahsatu rencana pembangunan strategis nasional berkaitan dengan sungai yaitu rencana pembangunan Bendungan Leuwikeris yang saat ini telah selesai tahap pembebasan tanahnya dan direncanakan pula pembangunan bendungan Matenggeng di Kecamatan Tambaksari. Melalui rencana pembangunan bendungan ini, Pemerintah Daerah yakin bahwa hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai sektor, diantaranya perdagangan, jasa, transportasi dan pariwisata.

Potensi pertanian dengan komoditi sebagaimana tersebut di atas yang nilainya cukup dominan, mempunyai prospek dan peluang pasar yang cukup baik antara lain tanaman pangan dan hortikultura dengan capaian produksi komoditas unggulan yaitu padi sebanyak 530.496 ton, jagung 36.022 ton, kacang tanah 3.204 ton, kacang kedelai

1.245 ton, kacang hijau 13 ton, ubi kayu 50.426 ton, ubi jalar 5.808 ton, cabe merah 4.203 ton, tomat 1.270 ton, duku 873 ton, manggis 1.601 ton dan produksi pisang sebanyak 213.971 ton. Selanjutnya berkenaan dengan potensi peternakan, capaian populasinya didominasi beberapa komoditas unggulan yaitu ternak sapi sebanyak 9.978 ekor, kerbau 2.795 ekor, domba 175.323 ekor dan kambing sebanyak 122.060 ekor. Adapun produksi unggas didominasi oleh ayam ras pedaging sebanyak 87.632.852 ekor dan produksi telur sebanyak 13.162 ton sedangkan potensi perikanan dengan komoditas unggulan yang diusahakan melalui budidaya kolam air tawar, air deras dan jaring apung dengan jumlah produksi sebanyak 52.432 ton, didominasi oleh ikan nila sebanyak 24.061 ton, lele 7.956 ton, gurame 4.893 ton dan ikan mas sebanyak 3.507 ton.

Potensi perkebunan yang didominasi oleh tanaman kelapa, kakao, cengkeh, teh dan kopi. Produksi terbesar adalah kelapa dengan rata-rata capaian produksi per tahun sebesar 19.681,64 ton ditunjang dengan adanya gerakan penanaman pohon kelapa sebagai sebuah perwujudan dari upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Adapun capaian produksi perkebunan pada tahun 2016 antara lain produksi kakao sebesar 350,09 ton, cengkeh 60,36 ton, produksi teh 346 ton dan produksi kopi sebesar 668,15 ton.

Potensi kehutanan berupa hutan Negara di Kabupaten Ciamis adalah seluas 17.996,16 Hektar antara lain hutan konservasi yang dikelola oleh BKSDA Jabar III seluas 5.576 Hektar dan hutan Produksi seluas 12.420,16 Hektar, sedangkan luas hutan rakyat/kebun rakyat di Kabupaten Ciamis sesuai hasil inventarisasi adalah seluas 58.672,73 Hektar dengan jumlah produksi sebanyak 283,507,17 m³ dan komoditas unggulannya adalah jati, mahoni, dan albasia. Adapun potensi kehutanan lainnya adalah bambu, sutera alam, jamur kayu dan lebah madu.

Potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Ciamis salah satunya adalah fosfat yang kondisi keberadaannya tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Cihaurbeuti, Rancah, Cijeungjing, Pamarican, Banjarsari dan Lakhok dengan jumlah perkiraan sebanyak 196 ton.

Berkenaan dengan potensi pariwisata, jumlah obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2016 secara keseluruhan sebanyak 32 obyek, diantaranya obyek wisata budaya yaitu Astana Gede, Kampung Kuta, Karangkamulyan, Situs Tambaksari dan Situs Gunung Susuru, Situs Candi Ronggeng, Situs Urug Kasang, Situs Haring Kuning, Situs Hariang Kencana, Situs Batu Tapak, Situs Gunung Padang, Situs Kemuning, Situs Dalem Kabuyutan, Situs Batu Tulis, Situs Sanghyang Samida, Situs Pangrumasan, Situs Prabu Dimuntur, Situs Panghulu Gusti Ciomas dan Situs Jambansari. Adapun obyek wisata alam sebanyak 8 obyek yaitu Situ Lengkong, Curug Tujuh, Curug Tilu, Situ Cibubuhan, Batu Cakra, Cikupa Air Panas dan Cipanjaluh sedangkan obyek wisata minat khusus yaitu arung jeram serta obyek wisata buatan yaitu Kolam Renang Tirta Winaya, Waterboom Ijakan dan Sukahaji.

Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diagendakan berbagai even kepariwisataan seperti Gelar Budaya Tatar Galuh, Pentas Seni Wayang Golek, kreativitas seni, Jamas Pusaka, Nyiar Lumar, upacara adat Seren Taun di Geger Sunten Tambaksari, Nyuguh, Hajat Bumi Nyangku, Upacara Adat Nyacar Jalan, Nyipuh, Misalin, Ngikis dan Merlawuh. Selain itu, telah tersedia pula sarana akomodasi atau penginapan yaitu hotel sebanyak 16 unit dengan jumlah kamar sebanyak 305 buah dan tempat tidur sebanyak 512 buah.

Selanjutnya pada potensi industri, terdapat 2 (dua) kategori yaitu Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) antara lain nata de coco, minyak kelapa, gula aren, gula kelapa, sale pisang dan pengolahan kayu serta Industri Logam Mesin Elektronika Aneka (ILMEA) antara lain industri alat-alat rumah tangga dari alumunium dan kerajinan anyam-anyaman.

Potensi IKAHH di Kabupaten Ciamis terdiri dari industri menengah sebanyak 4 unit, industri kecil formal sebanyak 937 unit dan industri kecil informal sebanyak 5.372 unit, sedangkan potensi ILMEA terdiri dari industri menengah sebanyak 6 unit usaha, industri kecil formal sebanyak 361 unit dan industri kecil informal sebanyak 3.229 unit.

Adapun sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah pasar Pemda tersebar di 4 Kecamatan, yaitu Ciamis, Kawali, Sindangkasih dan Banjarsari dengan jumlah kios/los sebanyak 3.370 unit. Selain itu terdapat pula Pasar Desa sebanyak 48 unit, mini market sebanyak 80 unit dan supermarket sebanyak 3 unit.

2. Sarana Prasarana Wilayah

Sarana dan prasarana wilayah yang dimiliki Kabupaten Ciamis untuk mendukung dan memperlancar mobilitas penduduk dalam kegiatan perekonomian diantaranya Jalan Nasional sepanjang 128,60 Km, Jalan Provinsi sepanjang 8,13 Km, Jalan Kabupaten sepanjang 848,296 Km dan jalan Desa/lokal sepanjang 2.703,92 Km, serta Terminal dan Stasiun pemberhentian kereta api yang dilintasi rute perjalanan Jakarta-Surabaya. Adapun jumlah penumpang kereta api pada tahun 2016 mencapai sebanyak 23.259 orang.

Prasarana irigasi yang dikelola di Kabupaten Ciamis sebanyak 298 buah yang terbagi atas irigasi teknis sebanyak 13 buah dan irigasi semi teknis sebanyak 285 buah. Berkenaan dengan prasarana air bersih, PDAM Tirta Galuh melayani 25.301 pelanggan dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 4.264.317 m³. Adapun berkenaan dengan prasarana listrik, jaringannya telah menjangkau seluruh desa dengan jumlah konsumsi listrik mencapai 342.134.648 kwh yang digunakan oleh 340.172 pelanggan yang terbagi kedalam 6 jenis tarif serta tersedianya pos dan telekomunikasi yang dikelola oleh BUMN dengan jumlah pelanggan jasa telekomunikasi sebanyak 15.748 sst, bisnis sebanyak 762 sst, *residensial* sebanyak 15.595 sst, pelanggan *speedy* sebanyak 6.795 sst serta sambungan lainnya sebanyak 113 sst.

3. Pertumbuhan Ekonomi

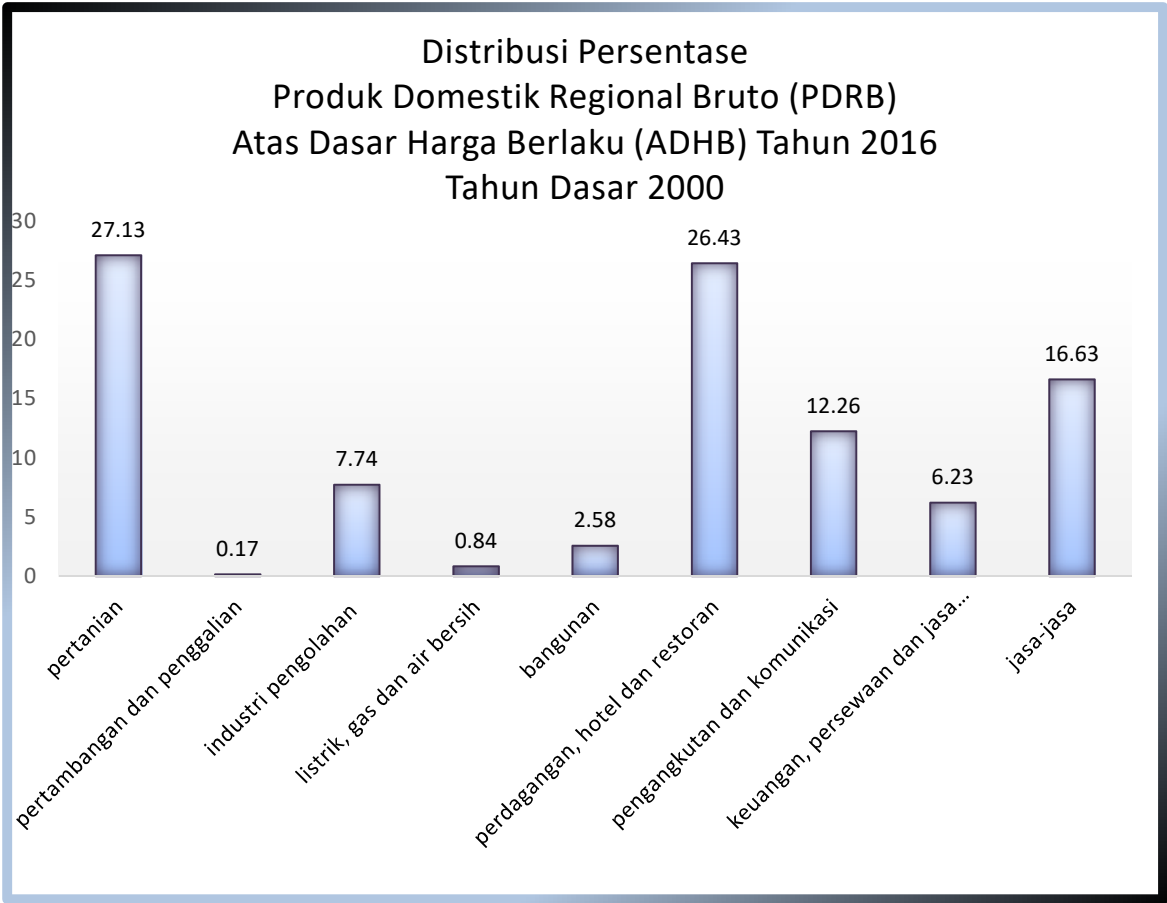
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa stakeholder yang memiliki otoritas pengolahan dan publikasi data statistik telah merilis Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tahun dasar baru yaitu tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDB dari tahun 2000 ke 2010 tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan pada tatanan perekonomian lokal, regional dan global dimana munculnya kegiatan ekonomi baru seperti berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif, meluasnya jasa layanan pasar modal, krisis ekonomi 2008 dan sebagainya yang berpengaruh terhadap struktur perekonomian nasional.

Atas dasar hal tersebut, diperoleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 mencapai sebesar 5,05% mengalami percepatan dari tahun sebelumnya sebesar 5,04% dengan laju inflasi sebesar 2,75%, tergolong ringan atau inflasi merayap (*creeping inflation*) yang masih wajar dan belum mengganggu perekonomian secara menyeluruh serta hal ini diyakini dapat mendorong peningkatan pendapatan nasional.

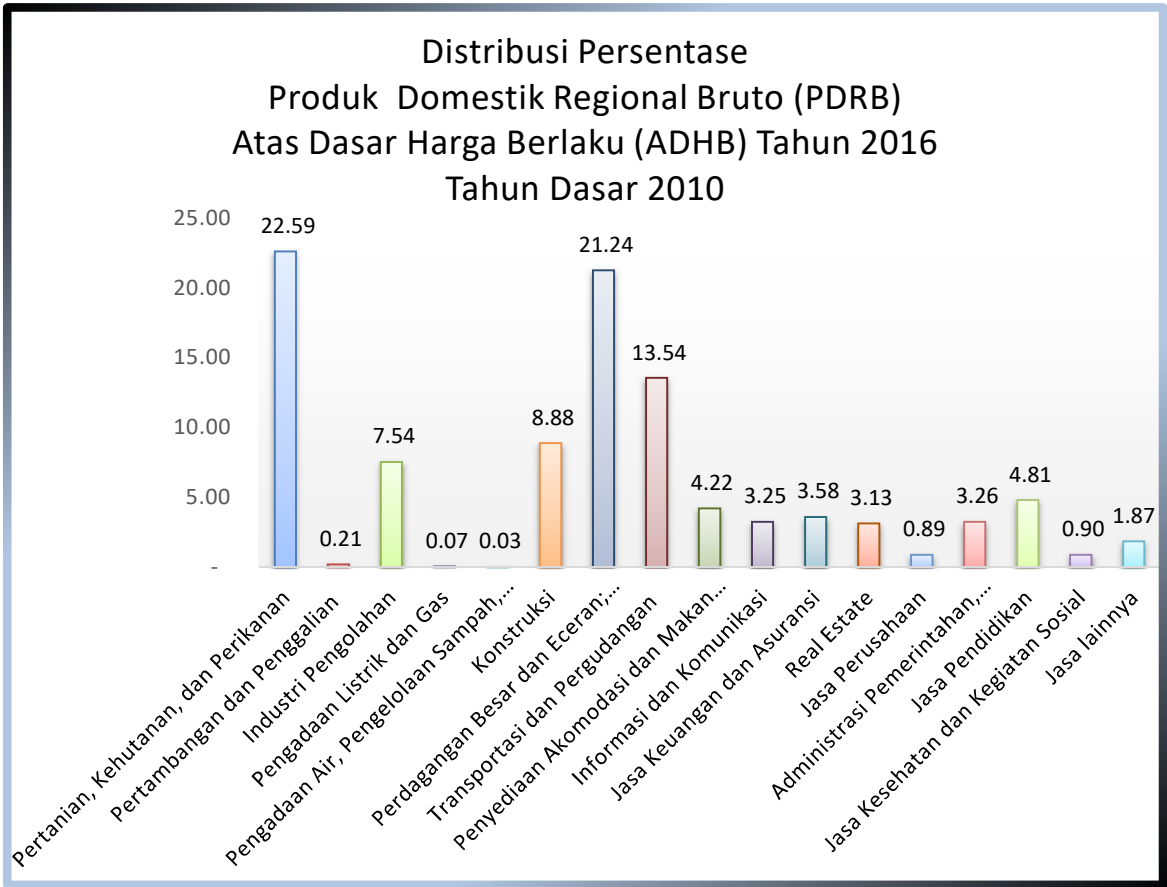
Selanjutnya dapat kami informasikan pula, bahwa berkenaan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar Harga Berlaku (AdHB) di Kabupaten Ciamis, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 dengan menggunakan penghitungan lama (data sementara) mencapai sebesar Rp. 24.355.312,90 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 21.869.935,27. Capaian tersebut didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa dengan total kontribusi sebesar 70,18%. Adapun total PDRB AdHB tahun 2016 dengan menggunakan penghitungan baru mencapai sebesar Rp. 24.344.397,78, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 22.886.226,94 yang didominasi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori transportasi dan pergudangan dengan total kontribusi sebesar 57,38%.

Memperhatikan kedua perhitungan PDRB di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur perekonomian di Kabupaten Ciamis termasuk daerah agraris dan perdagangan yang dari tahun ke tahun memberikan kontribusi paling dominan.

Secara rinci kontribusi pada masing-masing sektor berdasarkan perhitungan lama (tahun dasar 2000) dan perhitungan baru (tahun dasar 2010) dapat dilihat pada grafik berikut :



➔ **Sumber : BPS, 2017**



II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, selanjutnya untuk tahun 2016 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan jangka panjang daerah, maka visi, misi, strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

Visi Kabupaten Ciamis adalah ***“Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”***

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Maju Berkualitas :

Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan daerah ke depan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan juga tidak hanya sekedar kuantitas tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.

Kemandirian :

Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019 merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Misi :

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi di atas dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Selanjutnya ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2014-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat;

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Membangun perekonomian daerah yang tangguh;
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan.

RPJMD Kabupaten Ciamis periode Tahun 2014-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Panjang Jangka Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan pengembangan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Misi dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD.

Selanjutnya dirumuskan pula tujuan dan sasaran dari tiap misi tersebut yang hendak dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, sebagai berikut :

1. Misi 1 bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang terdidik; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; mengendalikan pertumbuhan penduduk; meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan; meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah; meningkatkan kerukunan hidup beragama serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang secara akumulasi meliputi 14 (empat belas) sasaran;
2. Misi 2 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah; meningkatkan pelayanan publik; meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi; meningkatkan kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum serta meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang secara akumulasi meliputi 10 (sepuluh) sasaran;
3. Misi 3 bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, meliputi 8 (delapan) sasaran;
4. Misi 4 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah; meningkatkan daya beli masyarakat; meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta meningkatkan ketahanan pangan yang secara akumulasi meliputi 10 (sepuluh) sasaran;
5. Misi 5 bertujuan untuk meningkatkan layanan pemerintah desa kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian masyarakat desa yang meliputi 6 (enam) sasaran.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, perlu ditetapkan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan. Adapun arah kebijakan yang dipilih untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 ditempuh melalui arah kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana prasarana;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- 3) Pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan;
- 4) Pengembangan kemitraan di bidang pendidikan;
- 5) Penuntasan program pendidikan dasar 9 tahun dan penguatan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun;
- 6) Peningkatan ketersediaan informasi, sarana dan prasarana perpustakaan;

- 7) Peningkatan fasilitas rawat inap di puskesmas dan rumah sakit;
- 8) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan baik secara kualitas maupun secara kuantitas;
- 9) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang layanan kesehatan;
- 10) Peningkatan penyediaan anggaran publik sektor kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
- 11) Peningkatan deteksi dini penyakit;
- 12) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga;
- 13) Pendewasaan usia perkawinan pertama;
- 14) Memantapkan peningkatan pencapaian KB aktif Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Mandiri;
- 15) Pengembangan usaha keluarga di berbagai sektor kegiatan ekonomi masyarakat;
- 16) Pemberdayaan pemuda sebagai pelopor dalam bidang ekonomi dan pendidikan;
- 17) Pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- 18) Fasilitasi permodalan bagi kelompok perempuan;
- 19) Pendukung pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- 20) Peningkatan dan pembinaan atlet;
- 21) Pemasyarakatan olahraga;
- 22) Peningkatan pengelolaan seni dan budaya;
- 23) Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya;
- 24) Pengelolaan keragaman seni budaya;
- 25) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan serta peningkatan fungsi sarana ibadah;
- 26) Meningkatkan toleransi antar umat beragama;
- 27) Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin;
- 28) Penyelesaian dampak kekerasan;
- 29) Mengembangkan desa layak anak;
- 30) Meningkatkan peranserta pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial;
- 31) Penjaringan kerja penanganan anak jalanan dan penyakit sosial lainnya.

2. Misi 2 ditempuh melalui arah kebijakan :

- 1) Peningkatan diklat bagi aparatur;
- 2) Pengembangan jabatan fungsional aparatur;
- 3) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana aparatur;
- 4) Pengembangan SOP dan Sistem Informasi Manajemen Daerah;
- 5) Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah;
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah;
- 7) Peningkatan informasi pembangunan di berbagai media;
- 8) Peningkatan dan penerapan standar pelayanan minimum;
- 9) Peningkatan kepuasan masyarakat;
- 10) Optimalisasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan yang lebih efektif, menyeluruh, terintegrasi, dan akurat;
- 11) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- 12) Diseminasi informasi produk perundang-undangan;
- 13) Penegakan Perda;
- 14) Sosialisasi Hukum dan HAM;
- 15) Peningkatan pemeliharaan Kantrantibmas;
- 16) Peningkatan wawasan kebangsaan kepada aparatur dan masyarakat;
- 17) Peningkatan kapasitas aparat pemda di bidang kerjasama antar stakeholder pembangunan;
- 18) Penyelenggaraan seminar dan lokakarya sebagai upaya menjaring kemungkinan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

3. Misi 3 ditempuh melalui arah kebijakan :

- 1) Peningkatan jalan kabupaten;
- 2) Peningkatan jalan strategis kecamatan;
- 3) Peningkatan jalan jalur yang dilalui Angkot/Angdes;
- 4) Peningkatan jalan di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten;
- 5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat;
- 6) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- 7) Peningkatan penanganan air bersih, air limbah dan drainase di daerah rawan sanitasi;
- 8) Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- 9) Penataan lingkungan perkotaan di Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- 10) Peningkatan penanganan persampahan;
- 11) Bantuan listrik bagi keluarga tidak mampu;
- 12) Pengembangan energi alternatif baru dan terbarukan;
- 13) Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha tambang;
- 14) Peningkatan kualitas dan fungsi kawasan lindung;
- 15) Peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 16) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 17) Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 18) Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 19) Pencegahan dini dan penanggulangan bencana;
- 20) Pembuatan regulasi penanggulangan bencana;
- 21) Pelatihan tanggap bencana di tingkat desa/kelurahan/kecamatan;
- 22) peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- 23) Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang;
- 24) Penyusunan rencana tata ruang untuk kawasan strategis dan kawasan potensial berkembang;
- 25) penyebarluasan informasi rencana tata ruang;
- 26) Pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang;
- 27) Penyusunan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang;

4. Misi 4 ditempuh melalui arah kebijakan :

- 1) Peningkatan produktivitas dan akses UMKM kepada sumber daya produktif melalui pencapaian TTG serta akses pemasaran;
- 2) Peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas;
- 3) Peningkatan kapasitas sumberdaya di bidang koperasi dan UMKM;
- 4) Pengembangan LKM;
- 5) Peningkatan kualitas produk UMKM;
- 6) Fasilitasi bantuan modal bagi PKL, pedagang pasar tradisional dan UMKM;
- 7) Peningkatan regulasi perizinan;
- 8) Pemilihan media promosi yang tepat sasaran;
- 9) Pengembangan dan peningkatan sistem informasi investasi;
- 10) Pameran investasi;
- 11) Inventarisasi potensi unggulan daerah;
- 12) Fasilitasi Sertifikasi produk unggulan daerah;
- 13) Meningkatkan promosi potensi unggulan lokal;
- 14) Jaringan kerjasama skala lokal, regional, nasional maupun internasional;
- 15) Revitalisasi Kepariwisata;
- 16) Peningkatan promosi wisata;
- 17) Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata;
- 18) Pengembangan sentra-sentra industri;
- 19) Pengembangan kluster industri;
- 20) Pengembangan sentra komoditas pertanian unggulan;

- 21) Revitalisasi Pasar Tradisional;
- 22) Fasilitasi pemasaran produk;
- 23) Sentralisasi PKL;
- 24) Peningkatan kapasitas toko tradisional dan penataan toko modern;
- 25) Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja;
- 26) Akses informasi ke bursa tenaga kerja;
- 27) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan keterampilan tenaga kerja;
- 28) Menciptakan wirausaha baru;
- 29) Mencetak lahan sawah baru;
- 30) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa dan Jalan Usaha Tani;
- 31) Optimalisasi teknologi budidaya dan pengelolaan pasca panen;
- 32) Peningkatan kapasitas petani;
- 33) Peningkatan kapasitas penyuluh termasuk penyediaan sarana dan prasarannya;
- 34) Peningkatan usaha agribisnis dengan penggunaan teknologi budidaya serta pengolahan;
- 35) Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemasaran hasil pertanian;
- 36) Membentuk BUMD hasil potensi unggulan daerah;
- 37) Peningkatan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat;
- 38) Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan;
- 39) Penganekaragaman dan keamanan pangan;
- 40) Peningkatan distribusi dan akses pangan;
- 41) Penanganan kerawanan pangan.

5. Misi 5 ditempuh melalui arah kebijakan :

- 1) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- 2) Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur perdesaan;
- 3) Penguatan kebijakan pembangunan desa tertinggal;
- 4) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat di pedesaan;
- 5) Pembentukan BUMDes;
- 6) Bantuan permodalan stimulan usaha keluarga;
- 7) Bantuan stimulan dan fasilitasi pembangunan;
- 8) Penguatan kerjasama desa.

C. PRIORITAS DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 berpedoman kepada pencapaian target RPJMD tahap ketiga dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan capaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2016 serta memperhatikan pula terhadap tantangan dan isu pembangunan Nasional, isu strategis Provinsi Jawa Barat dan isu strategis Kabupaten Ciamis.

Sejalan dengan kondisi di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka isu strategis Kabupaten Ciamis Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kesempatan pendidikan;
2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Daya beli masyarakat;
4. Ketahanan pangan;
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketenagakerjaan;
6. Kemitraan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan;
7. Iklim usaha;
8. Fasilitasi dan pembinaan pelaku UMKM;
9. Pengembangan destinasi wisata;
10. Pemberdayaan masyarakat;

11. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
12. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan;
13. Kapasitas keuangan daerah;
14. Optimalisasi kinerja Pemerintahan Daerah dan Desa;
15. Kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2016 berdasarkan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2016 yang disusun melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan isu strategis Kabupaten Ciamis tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan melalui 2 (dua) sasaran prioritas pembangunan yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan budaya minat baca;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, melalui 2 (dua) sasaran prioritas pembangunan yaitu meningkatnya layanan kesehatan dan meningkatnya kesehatan lingkungan;
3. Pengembangan pertanian, kehutanan dan perikanan, melalui 4 (empat) sasaran prioritas pembangunan, yaitu terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan; meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani; meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan.
4. Pengembangan pariwisata dan dunia usaha, melalui 7 (tujuh) sasaran prioritas pembangunan yaitu pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat; meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan termasuk lembaga syariah dalam pengembangan perekonomian rakyat; meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal; meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah; terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal; terwujudnya sarana prasarana perekonomian masyarakat; meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan.
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketenagakerjaan, melalui 2 (dua) sasaran prioritas pembangunan, yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dan menurunnya PMKS;
6. Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga melalui 5 (lima) sasaran prioritas pembangunan, yaitu mempertahankan laju pertumbuhan penduduk; meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan; meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/ kemasyarakatan; meningkatnya prestasi olahraga serta terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan.
7. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui 4 (empat) sasaran prioritas pembangunan, yaitu meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan; meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah; meningkatnya penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat serta meningkatnya kualitas penataan ruang.
8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, melalui 4 (empat) sasaran prioritas pembangunan, yaitu meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi; meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air; meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman serta meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang.
9. Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah, melalui 10 (sepuluh) sasaran prioritas, yaitu meningkatnya kualitas SDM aparat; meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi; meningkatnya transparansi; meningkatnya pelayanan

masyarakat; meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik; meningkatnya kesadaran hukum masyarakat; terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM); terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan lembaga pendidikan.

10. Pembangunan Perdesaan melalui 7 (tujuh) sasaran prioritas yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD; meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa; menurunnya jumlah desa tertinggal; meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa; meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa; penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mencapai sasaran prioritas di atas dan target indikator makro tahun 2016 serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, dilaksanakan 171 program tersebar pada seluruh urusan desentralisasi yaitu sebanyak 34 urusan pemerintahan sebagaimana uraian di bawah ini.

III. URUSAN DESENTRALISASI

Sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Ciamis menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Adapun hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2016 melalui program kegiatan pada urusan wajib dan pilihan sesuai prioritas daerah yang ditetapkan, sebagai berikut :

A. *Prioritas 1 (Satu)*, yaitu Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

Implementasi peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pendidikan dan perpustakaan, diantaranya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pengembangan pendidikan non formal dan informal serta berbagai kegiatan lainnya yang menunjang terhadap capaian indikator, sehingga hasil pada urusan pendidikan telah diperoleh capaian kinerja dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2000 antara lain meningkatnya indeks pendidikan mencapai sebesar 84,84 yang didukung dengan Angka Melek Huruf mencapai 99,39% dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,36 Tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai sebesar 104,20%, SMP/MTs sebesar 98,75% dan SMA/SMK/MA sebesar 68,80%.

Selanjutnya berkenaan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A pada Tahun 2016 mencapai sebesar 98,92%, SMP/MTs/Paket B sebesar 90,35% dan SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 62,00% serta Angka Kelulusan SD/MI/Paket A mencapai 100%, SMP/MTs/Paket B mencapai 100% dan SMA/MA/MA/Paket C mencapai 100%. Adapun berkaitan dengan Angka Putus Sekolah, untuk SD/MI/Paket A mencapai sebesar 0,01%, SMP/MTs/Paket B sebesar 0,02% dan SMA/SMK/MA/ Paket C sebesar 0,07%.

Hasil lainnya adalah terbangun/terlaksananya perbaikan sarana sekolah, tersedianya peralatan media pendidikan, penjasorkes dan seni budaya keterampilan, tersedianya alat laboratorium IPA di 50 sekolah, terbangunnya 2 aula SMUN Ciamis, dan penambahan ruang kelas baru bagi SMA Negeri, terfasilitasinya diseminasi program USAID PRIORITAS, terfasilitasinya sertifikasi pendidik untuk 630 orang, terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk 278 orang, terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal, serta terlaksananya ujian nasional paket A, B, C sebanyak 846 orang.

Berkenaan dengan urusan perpustakaan telah dicapai beberapa hasil diantaranya terbangunnya gedung kantor perpustakaan dengan biaya dari bantuan provinsi, tersedianya koleksi bahan pustaka/buku sebanyak 57.375 eksemplar, terlaksananya

inovasi “15 Menit Rindu Membaca” sebanyak 35 titik yaitu 35 Sekolah Dasar di 26 kecamatan, terlayannya pengunjung perpustakaan sebanyak 35.000 orang, meningkatnya jumlah anggota Perpustakaan Daerah sebanyak 6.243 orang, tersedianya bahan pustaka dan sarana perpustakaan di pontren dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) serta tersampainya informasi dan publikasi minat baca melalui media audio visual (televisi lokal), media cetak berupa koran, banner, spanduk maupun baliho serta melalui *website*.

B. Prioritas 2 (Dua), yaitu Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Implementasi peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya program obat dan perbekalan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pelayanan kesehatan penduduk miskin, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD, manajemen kesehatan dan program pelayanan kesehatan.

Beberapa hasil yang telah dicapai pada urusan kesehatan antara lain tersedianya obat-obatan dan bahan habis pakai untuk Yankesdas dan terfasilitasinya pelayanan kefarmasian di 37 puskesmas; terfasilitasinya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas (BPJS-PBI) sebanyak 9.103 sasaran; terlayannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Askes serta Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir selama 12 bulan; tersusunnya study kelayakan, Master Plan dan DED Rumah Sakit Type C Banjarsari dan Kawali; terlaksananya pembangunan Rumah Sakit type C Kawali; terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin sebanyak 50 kasus; terlaksananya pelayanan sunatan massal kepada 110 sasaran; terehabilitasinya 13 unit layanan Puskesmas dan meningkatnya status 2 puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan (DTP) dan Rawat Inap serta terbangunnya 2 poskesdes.

Selanjutnya berkenaan dengan capaian pembangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah telah diperoleh beberapa hasil seperti terbangunnya ruang rawat inap anak lantai 3, ruang rawat inap paviliun H Hasan Sobari, gedung instalasi Gizi/IPSRS/ISRS, tersedianya ruang rawat inap kelas III sebanyak 3 lantai, terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran spesialis jantung, tersedianya alat medis dan non medis di ruang ICU sebanyak 6 jenis, pelaksanaan PMT bagi 100 balita gizi buruk dan 111 baduta gakin, terpantaunya siswa anemia di 10 SD, terpenuhinya pelayanan kesehatan BLUD terhadap 157.895 kunjungan, terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis Orthopedi.

Adapun berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan di 37 Puskesmas se Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan beberapa upaya melalui beberapa program di atas dan diperoleh hasil antara lain terlayannya pemeriksaan kesehatan CJH, akreditasi kesehatan dan penanganan kegawatdaruratan dasar serta penyehatan lingkungan, terlaksananya upaya peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit serta terlayannya imunisasi.

Berkenaan dengan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan melalui program keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS). Adapun hasil yang diperoleh antara lain terlayannya KB baru melalui kegiatan Bhakti IBI sebanyak 14.815 akseptor dan Bhakti TNI sebanyak 9.528 akseptor, terselenggaranya Hari Keluarga, kegiatan kelompok Bina Keluarga dan UPPKS pemberdayaan ekonomi keluarga, terlaksananya kegiatan Jumbara yang diikuti oleh 348 remaja, sosialisasi kesehatan reproduksi remaja sebanyak 273 orang, terbentuknya Kota Layak Anak dan Forum Anak Daerah di 26 kecamatan, menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 50%,

terlayannya konseling keluarga sejahtera di seluruh kecamatan, serta terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera melalui kegiatan P2WKSS di Desa Binaan sebanyak 100 KK berlokasi di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi.

C. Prioritas 3 (Tiga), yaitu Pengembangan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Implementasi pengembangan pertanian, kehutanan dan perikanan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan ketahanan pangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, diantaranya pada program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan ikan, peningkatan penerapan teknologi peternakan, pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, peningkatan kesejahteraan petani, pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perencanaan dan pengembangan hutan dan lain-lain.

Beberapa capaian hasil pada prioritas pembangunan ini antara lain ketersediaan pangan utama di Kabupaten Ciamis terdiri dari produksi padi sebanyak 530.496 ton, jagung sebanyak 36.022 ton, jumlah lumbung pangan masyarakat sebanyak 259 LPM, besarnya cadangan padi/beras di lumbung sebanyak 410,53 ton, cadangan gabah daerah sebanyak 17,99 ton, Cadangan pangan daerah dan masyarakat 428,52 ton serta menurunnya rumah tangga rawan pangan dengan tingkat capaian sebesar 164,61% dan tertangani daerah rawan pangan sebanyak 28 lokasi.

Selanjutnya hasil yang telah tercapai pada program kegiatan peningkatan ketahanan pangan antara lain, dimanfaatkannya pekarangan untuk pengembangan produk pertanian lokal, terlaksananya kegiatan GP-PTT padi, jagung dan kedelai, terlaksananya pengembangan durian di Kecamatan Sadananya, terkendalinya serangan OPT dan dampak perubahan iklim, terlaksananya penerapan teknologi panen hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura, meningkatnya nilai tambah produk ubi kayu. Adapun untuk penanggulangan masalah masih relatif tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu, serta dalam rangka memenuhi gizi dan konsumsi masyarakat dilaksanakan sosialisasi tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat luas, penyelenggaraan Lomba Cipta Menu B2SA berbasis Non Beras serta Pameran Pangan Lokal.

Berkenaan dengan urusan pertanian, telah tercapai beberapa hasil antara lain terlaksananya pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, terfasilitasinya media promosi hasil pertanian, tersedianya instalasi kebun pembibitan dan pembenihan hortikultura, terlaksananya penerapan teknologi melalui percontohan pertanian, meningkatnya kapasitas kinerja pengelolaan sumber daya pertanian melalui fasilitasi kegiatan tim Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida, fasilitasi Asuransi Pertanian, fasilitator PUAP dan SID (Survey, Investigasi dan Desain) perluasan areal serta meningkatnya penunjang pengembangan komoditas tanaman pangan berupa jalan usaha tani sebanyak 2 unit, Dam parit sebanyak 18 paket, embung sebanyak 5 paket dan bangunan penunjang desa mandiri benih sebanyak 2 paket.

Selain capaian hasil kinerja tersebut di atas, melalui pelaksanaan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, telah terlaksana beberapa kegiatan dalam rangka promosi pertanian diantaranya melalui even Hari Krida Pertanian, Pameran pembangunan menyambut Hari Jadi Kabupaten Ciamis, Pasar Ramadhan, pameran dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2016 dan Gebyar Wisata, Perdagangan dan Investasi Nasional Tahun 2016 serta terlaksananya bimbingan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait di bidang pemasaran pertanian diantaranya Asosiasi Pasar Tani dan STA Panumbangan.

Pada urusan kehutanan telah dicapai pula beberapa hasil antara lain, tercapainya penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 600.000.000,-, terbangunnya persemaian tanaman kehutanan dan perkebunan sebanyak 225.000 batang, terpeliharanya kebun benih unggul seluas 3 hektar, terselenggaranya penguatan modal usaha Tani Gemar Paket B dan C, terlaksananya pembuatan hutan rakyat seluas 400 Ha, terlaksananya upaya rehabilitasi hutan dan lahan berbasis sekolah, terlaksananya kajian penyusunan studi kelayakan pembangunan TAHURA, serta terehabilitasinya lahan kritis seluas 4.933,18 Ha atau dengan capaian sebesar 99,84%.

Selanjutnya pada sub urusan peternakan dan perikanan telah dicapai beberapa hasil, antara lain meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha agribisnis peternakan dan perikanan sebanyak 40 kelompok melalui bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, terpeliharanya kesehatan ikan melalui penyediaan 4 jenis bahan obat-obatan, tersedianya data perikanan di 27 kecamatan dan tersedianya bibit ikan sebanyak 1.375.000 ekor dengan berbagai jenis serta tercapainya produksi ikan sebesar 52.432 kg dan konsumsi ikan sebesar 17,72 kg/kap/tahun serta terlaksananya diversifikasi pangan olahan berbahan baku ikan dan gerakan makan ikan setiap tahun. Adapun pada peningkatan produksi hasil ternak, selain sebagaimana diuraikan di atas, telah dicapai pula beberapa hasil kegiatan antara lain tersedianya ternak ayam buras sebanyak 5.500 ekor, tersedianya rumput hijauan, tersedianya pembibitan ternak domba serta terbangunnya kawasan unggas lokal pedesaan dengan hibah 1.430 ekor itik kepada masyarakat, berkembangnya jaringan pemasaran agribisnis menjadi sebanyak 36 jaringan, meningkatnya jumlah usaha agribisnis menjadi sebanyak 36 unit dan bertambahnya pasar ikan menjadi 7 unit.

D. Prioritas 4 (Empat), yaitu Pengembangan Pariwisata dan Dunia Usaha.

Implementasi pengembangan pariwisata dan dunia usaha dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan pariwisata, kebudayaan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta penanaman modal, diantaranya dilaksanakan melalui program pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kemitraan, pengembangan industri kecil dan menengah, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Beberapa hasil yang dicapai pada prioritas keempat ini, antara lain kunjungan wisata mencapai sebanyak 640.941 orang dengan tingkat capaian sebesar 128,19%, tersedianya informasi kepariwisataan melalui *website*, terlaksananya pemasaran/promosi pariwisata sebanyak 9 kali di berbagai kota, tersedianya *bookleat* informasi pariwisata sebanyak 4.040 eksemplar, terlaksananya penyajian atraksi wisata sebanyak 5 kali, terlaksananya pameran produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 9 kali, tertatanya objek wisata Situ Wangi dan Situ Cibubuhan serta terkelolanya fasilitas objek wisata di Karangkamulyan, Astana Gede, Situs Gunung Susuru dan Situ Lengkong Panjalu.

Selain itu, telah terselenggara pula kegiatan forum industri kreatif, sosialisasi pemanfaatan MDI sebagai media promosi produk industri kreatif; terlaksananya pertunjukan seni daerah sebanyak 5 kali, penyajian karya kreatif sub sektor kriya dan kuliner, tampilnya seni budaya pada festival/gelar seni budaya serta terfasilitasinya pelaku ekonomi kreatif dalam keikutsertaan penyelenggaraan kawasan ekonomi kreatif.

Hasil lainnya yang mendukung terhadap pengembangan dunia usaha antara lain terfasilitasinya promosi pemasaran produk potensi daerah untuk 15 komoditi, terlaksananya monitoring potensi pasar tradisional di 27 kecamatan, terbangunnya gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang, terlaksananya promosi produk Pedagang Kaki Lima (PKL), terlaksananya Revitalisasi/

Pembangunan Pasar Pemda dan Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK), terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan serta pengawasan sistem distribusi pupuk di kecamatan, terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati cukai tembakau sebanyak 130 toko, terlaksananya peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa sebanyak 60 komoditi dan tersedianya sarana prasarana pasar Pemda yang memadai di 2 lokasi melalui revitalisasi/pembangunan pasar.

Berkenaan dengan program pengembangan industri kecil dan menengah, telah tercapai beberapa hasil, antara lain terfasilitasinya pengembangan sarana promosi hasil produksi sebanyak 15 komoditi, terlaksananya pelatihan teknik produksi industri kecil pangan sebanyak 25 orang, terlaksananya pembangunan dan pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah sebanyak 30 IKM dan UKM, terbinanya industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya sebanyak 540 orang dan terbinanya pelaku IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya sebanyak 45 IKM serta terlaksananya pengembangan IKM Batik Ciamis sebanyak 1 kelompok.

Adapun hasil lainnya yang telah dicapai adalah terbinanya kelompok pengrajin sebanyak 8 kelompok, terlindunginya 33 produk pada 11 IKM oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta terealisasinya jumlah PMDN sebanyak 703 perusahaan dengan capaian nilai investasi sebesar Rp. 178 Milyar.

E. *Prioritas 5 (Lima)*, yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan

Implementasi penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan perumahan, perencanaan pembangunan, sosial dan ketenagakerjaan, diantaranya melalui program pengembangan perumahan; pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya; pembinaan anak terlantar/remaja putus sekolah; peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan kesempatan kerja.

Beberapa hasil yang dicapai pada prioritas kelima ini antara lain, terbangunnya sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, terfasilitasinya bantuan Rutilahu sebanyak 389 unit dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 842 unit, terlaksananya sosialisasi dan monitoring pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), terlaksananya pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan bagi RTSM, terlaksananya layanan penanggulangan kemiskinan daerah pada Lembaga Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) melalui program Kartu Calakan, Kartu Walagri dan Kartu Waluya yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok sasaran penduduk miskin secara bertahap, terbinanya keluarga miskin melalui penyaluran bantuan sebanyak 440 paket, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 36.083 sasaran dan yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 29.238 sasaran serta menurunnya jumlah PMKS sebanyak 36.061 sasaran.

Selanjutnya berkenaan dengan urusan ketenagakerjaan yang diharapkan mampu menciptakan wirausaha baru, antara lain terlatihnya 40 orang pencari kerja di bidang kerajinan montir; masyarakat dan penganggur di lingkungan petani tembakau sebanyak 16 orang, meningkatnya kemampuan tenaga kerja di bidang montir, menjahit, instalasi listrik, budidaya ikan lele dan pengolahan hasil pertanian sebanyak 80 orang, meningkatnya kualitas dan produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan 16 orang tenaga kerja mandiri, terbukanya kesempatan kerja di bidang mebeulair sebanyak 4 kelompok, tersedianya pekerjaan sementara bagi penganggur sebanyak 10 orang dan terfasilitasinya ketersediaan lapangan pekerjaan sebanyak 900 HOK.

F. *Prioritas 6 (Enam)*, yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender serta Pemuda dan Olahraga.

Implementasi pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga, dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

serta kepemudaan dan olahraga, diantaranya melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta program kepemudaan dan olahraga.

Beberapa hasil yang telah dicapai pada prioritas keenam ini antara lain terselenggaranya pembinaan kelompok teknologi tepat guna di 27 kecamatan, tersalurkannya papan profil elektronik desa dan buku pedoman desa bagi perpustakaan desa ke 35 desa, meningkatnya dukungan partisipasi masyarakat untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana melalui BSMSS, terbinanya manajemen BUMDes sebanyak 158 unit, terwujudnya partisipasi atas pembangunan infrastruktur desa melalui pembinaan teritorial, terwujudnya partisipasi atas pembangunan melalui gotong royong, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui TMMD serta tercapainya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 64 Miliar.

Berkenaan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, beberapa hasil yang telah dicapai yaitu terfasilitasinya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 45 kasus, terfasilitasinya penanganan KDRT dan *trafficking*, terfasilitasinya pembinaan keterampilan bagi 32 Kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dalam peningkatan usaha dan keterampilan, meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan serta terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan melalui GOW.

Berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, beberapa hasil yang telah dicapai antara lain terlaksananya pembinaan terhadap organisasi keolahragaan seperti POPDA, Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Pasangiri Pencak Silat Tradisional, dan PORPEMDA. Selain capaian hasil di atas, telah tercapai pula beberapa hasil kegiatan antara lain tersosialisasikannya senam kebugaran jasmani masyarakat, terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan olahraga yaitu pameran kepemudaan, tersosialisasikannya bahaya narkoba dan AIDS untuk pemuda dan pelajar SMA/SMK; serta terlaksananya penataan sarana prasarana olahraga melalui pembangunan Lapangan Sepak Bola Perum Kertasari, Lapangan Atletik di Kelurahan Linggasari, TPT Lapangan Sepak Bola Desa Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti, tribun dan penataan kawasan Track BMX serta terpenuhinya kelengkapan Gedung Tenis Indoor.

G. Prioritas 7 (Tujuh), yaitu Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Implementasi penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sosial serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, diantaranya dilaksanakan melalui program pengendalian banjir; perencanaan tata ruang; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; pengelolaan ruang terbuka hijau; pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam serta perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

Beberapa hasil yang telah dicapai pada prioritas ketujuh ini antara lain terkendalinya lingkungan dari ancaman banjir dan longsor melalui perencanaan dan pembuatan proteksi tebing, normalisasi saluran/sungai dan pemasangan bronjong pada beberapa titik lokasi rawan bencana; tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis, orthorektifikasi peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan, Masterplan Kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kabupaten Ciamis dan RTBL Kota Banjarsari serta pengendalian pemanfaatan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Selain itu, pada urusan lingkungan hidup telah tercapai pula beberapa capaian kinerja, antara lain terlaksananya koordinasi dalam rangka penilaian Kota Sehat/Adipura; pengembangan teknologi

pengelolaan sampah melalui kelompok bank sampah; pengembangan laboratorium lingkungan, terlaksananya pemantauan kualitas air; tersedianya lubang resapan biopori guna meningkatkan resapan air hujan terhadap tanah; meningkatnya sarana prasarana pengelolaan persampahan; terkendalinya kebersihan dan keindahan melalui pelayanan kebersihan serta terlaksananya penataan Taman Anggur Ciamis.

Berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan bencana, selain sebagaimana uraian di atas telah dicapai pula beberapa hasil kegiatan antara lain terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana; terlaksananya pelatihan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana; terpenuhinya kebutuhan sarana logistik bagi korban bencana; terfasilitasinya pra bantuan rumah akibat bencana alam/sosial; terbentuknya desa tangguh bencana, sekolah siaga bencana dan tersusunnya rencana penanggulangan bencana daerah. Adapun untuk mengetahui potensi, kejadian bencana dan upaya penanggulangannya, akan kami uraikan pada bab selanjutnya.

H. Prioritas 8 (Delapan), yaitu Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Implementasi ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum, perhubungan serta energi dan sumberdaya mineral diantaranya program pembangunan jalan dan jembatan; pembangunan turap/talud/bronjong; pembangunan sistem informasi/ database jalan dan jembatan; rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; pembangunan infrastruktur perdesaan; pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; pengendalian dan pengamanan lalu lintas; rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; peningkatan pelayanan angkutan serta pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;

Beberapa hasil yang telah dicapai pada prioritas kedelapan ini antara lain peningkatan jalan sepanjang 104,56 km; pembangunan jembatan sebanyak 12 unit, terlaksananya pengaspalan hotmix; terehabilitasi/terpeliharanya jalan dan jembatan, terbangunnya sarana pelengkap jalan tersebar di Kabupaten Ciamis; tersedianya sistem informasi/database jalan berbasis GIS (*Geography Information System*), terbangunnya/ terehabilitasinya jalan dan jembatan wilayah strategis kawasan Agropolitan dan kawasan lumbung padi serta terbangunnya infrastruktur perdesaan antara lain melalui rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan, pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan serta terlaksananya pengelolaan 148 jaringan irigasi;

Berkenaan dengan capaian kinerja urusan perhubungan antara lain tersedianya data kajian studi perencanaan terminal di Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) di Kota Ciamis, pengembangan taman edukasi lalu lintas serta DED fasilitas penyebrangan jalan; terlaksananya pembangunan 1 unit halte/*shelter* di lingkungan Taman Surawisesa Kecamatan Kawali; terlaksananya sosialisasi pendidikan keselamatan berlalu lintas melalui “Saba Sakola”; tersedianya data base kebutuhan rambu, marka dan sistem informasi; terpeliharanya prasarana lalu lintas berupa terlaksananya uji kalibrasi dan terpeliharanya *warning light* dan *traffic light*; terlaksananya pengendalian operasi angkutan umum serta pengamanan lalu lintas pada even Lebaran, Natal dan Tahun Baru; terawasinya operasional 12 UPTD terminal; terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan pengadaan *traffic light* berbasis ATCS, terlaksananya pemeliharaan rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) di 600 titik, rehabilitasi PJU sebanyak 54 titik dan terpasangnya PJU baru sebanyak 678 titik tersebar di 26 Kecamatan; terpasangnya PJU PLTS di 7 titik yang dianggap rawan kecelakaan serta terfasilitasinya pemasangan Instalasi Rumah/ Sambungan Listrik Desa (IR/SR Lisdes) untuk masyarakat pra KS sebanyak 458 KK.

I. Prioritas 9 (Sembilan), yaitu Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Implementasi peningkatan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan perencanaan pembangunan; pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; statistik; kearsipan serta komunikasi dan informatika, diantaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur; peningkatan kualitas pelayanan publik; peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah; penataan peraturan perundang-undangan; peningkatan sarana dan prasarana aparatur; peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; pendidikan kedinasan; pengembangan data/informasi statistik daerah; pengembangan komunikasi, informasi dan media massa serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui diklat.

Beberapa hasil yang telah dicapai pada prioritas kesembilan ini antara lain terpenuhinya formasi jabatan sebanyak 1.234 jabatan struktural dan 1.704 pejabat fungsional; terfasilitasinya kenaikan pangkat PNS sebanyak 2.989 orang melalui penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis; tersedianya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 mencapai 75%; tertanganinya 11 kasus pelanggaran disiplin PNS serta terlaksananya proses pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi 503 PNSD Kabupaten Ciamis. Selanjutnya tercapai pula beberapa hasil yaitu terfasilitasinya pelaksanaan ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) sebanyak 86 PNS; meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebanyak 35 orang melalui pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, pejabat struktural sebanyak 45 orang melalui diklat penjenjangan struktural dan PNSD lainnya sebanyak 293 orang melalui diklat teknis dan fungsional; terselenggaranya sumpah PNS sebanyak 726 orang serta tercapainya prestasi olahraga pada event Porpemda, Porsenitas dan pentas seni sekaligus terjaganya kesehatan dan silaturahmi antar pegawai.

Berkenaan dengan hasil program peningkatan kualitas pelayanan publik, sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta program penataan peraturan perundang-undangan, antara lain terbinanya mental dan kode etik PNS sebanyak 108 orang; terkoordinasikannya penyelenggaraan pemerintahan selama 12 bulan; meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD melalui pelaksanaan pelatihan, sosialisasi dan bimtek; terlaksananya pengawasan internal secara berkala; tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan Pemkab Ciamis; terbangunnya gedung kesenian serta tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah berupa rancangan peraturan daerah, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, beberapa hasil yang telah dicapai antara lain terlaksananya pendataan, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan PBB-P2; terpeliharanya data objek dan subjek PBB; terpenuhinya kebutuhan barang/aset sebanyak 10 unit; terlaksananya penataan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; tersedianya aplikasi laporan keuangan BOS; terlaksananya pemberian penghargaan kepada 389 orang yang telah melakukan optimalisasi pendapatan daerah; terlaksananya pendampingan dan pengembangan aplikasi BLUD berbasis akrual; terpeliharanya infrastruktur jaringan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah; terlaksananya penagihan 10 pajak daerah dan PBB P2; terfasilitasinya implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada 74 SKPD; terfasilitasinya penatausahaan dan rekonsiliasi aset dan kewajiban daerah; terkendalinya pendistribusian SPPT PBB dan kelengkapan lainnya; terlaksananya pendataan/inventarisasi barang milik daerah serta terlaksananya penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa di 26 kecamatan dan 258 desa.

Hasil lainnya yang membanggakan dan merupakan hasil kerja keras serta dukungan semua pihak adalah kembali diraihnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI. Selanjutnya berkaitan dengan capaian hasil kinerja pada urusan statistik serta komunikasi dan informatika yang mendukung terhadap capaian prioritas pembangunan kesembilan ini, antara lain tersedianya berbagai dokumen data statistik daerah serta terpelihara dan tersebarluaskannya informasi kedinasan dan pembangunan daerah melalui *website* Pemerintah Kabupaten Ciamis.

J. Prioritas 10 (Sepuluh), yaitu Pembangunan Perdesaan.

Implementasi pembangunan perdesaan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta urusan pekerjaan umum dan perumahan, diantaranya pada program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; pengembangan lembaga ekonomi dan pembangunan infrastruktur perdesaan; lingkungan sehat perumahan dan lain-lain.

Beberapa hasil yang telah dicapai pada prioritas kesepuluh ini antara lain meningkatnya intensitas penyelenggaraan pertemuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tersedia dan didayagunakannya data profil desa/kelurahan secara *online*, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa serta terpilihnya desa berprestasi melalui penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten; meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana perdesaan melalui rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan serta pengaspalan jalan lingkungan; meningkatnya sarana prasarana air bersih/air minum melalui pembangunan sanitasi lingkungan di wilayah perdesaan; tersalurkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa tugas pembantuan merupakan satu asas penyelenggaraan pemerintahan di NKRI, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomikan kepada Daerah.

Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas, mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Daerah. Demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi Tugas Pembantuan.

Pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan Tugas Pembantuan dari 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Selanjutnya dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Kementerian Dalam Negeri memberikan tugas pembantuan pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui DIPA Program Penataan Administrasi Kependudukan, kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK). Hasil dari tugas pembantuan ini antara lain tersusunnya laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten sebanyak 1 (satu) laporan.
2. Kementerian Pertanian memberikan tugas pembantuan kepada 2 (dua) SKPD pelaksana urusan pertanian yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan.

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Sesuai DIPA Kementerian Pertanian, pada sub urusan pertanian tanaman pangan dilaksanakan 4 (empat) program, antara lain program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan; peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan serta penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Beberapa hasil kinerja yang telah dicapai antara lain :

- 1) Berkembangnya budidaya ubi kayu seluas 250 hektar, ubi jalar seluas 17 hektar tersebar di 14 Kecamatan dan padi seluas 7.020 hektar tersebar di 26 Kecamatan serta tersedianya penunjang administrasi kegiatan dan dokumen teknis lainnya sebanyak 2 dokumen;
- 2) Berkembangnya kawasan aneka cabai seluas 110 hektar tersebar di 18 Kecamatan, kawasan aneka tanaman obat untuk komoditi kapolaga seluas 5 hektar di Kecamatan Cihaurbeuti dan Panjalu serta desa organik berbasis tanaman sayur berlokasi di Desa Maparah Kecamatan Panjalu dan Desa Bangbayang Kecamatan Cipaku didampingi sarana penunjang administrasi kegiatan dan dokumen teknis lainnya sebanyak 1 dokumen.
- 3) Berkembangnya irigasi tersier seluas 2000 hektar tersebar di 26 Kecamatan, irigasi permukaan sebanyak 4 unit di Kecamatan Cipaku, Cidolog, dan Cijeungjing serta embung sebanyak 15 unit tersebar di 13 Kecamatan; bertambahnya luas areal sawah seluas 100 hektar beserta sarana produksi dan dukungan manajemen di Kecamatan Cijeungjing, Cidolog, Sukadana dan Cipaku; terselenggaranya pemberian insentif dan operasional untuk aparat TNI dalam rangka pengawalan UPSUS swasembada padi, jagung dan kedelai serta terlaksananya pendampingan dan pelaporan terkait penyaluran pupuk dan pestisida.
- 4) Terfasilitasinya penyediaan sarana panen, pasca panen dan sarana angkut berupa *combine harvester* sebanyak 40 unit, *power thrasher* sebanyak 4 unit, *corn sheller* sebanyak 20 unit, *corn combine harvester* sebanyak 2 unit, *power thraser* multi guna sebanyak 4 unit dan sarana pengangkut hasil pertanian sebanyak 2 unit.

b. Dinas Peternakan dan Perikanan

Sesuai DIPA, program yang dilaksanakan pada sub urusan ini yaitu program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan; pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak serta dukungan manajemen dan teknis lainnya yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan hasil yang dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengembangan budidaya sapi potong sebanyak 75 ekor untuk 6 kelompok yaitu kelompok Cicadas Sari Sentana Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri, Kelompok Dar El Rahman Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg, Kelompok Sri Rejeki Utama Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok, Kelompok Saluyu Pasir Landeuh Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti dan Kelompok Karyasari II Desa Gereba Kecamatan Cipaku serta meningkatnya pengembangan ternak domba sebanyak 40 ekor untuk 1 kelompok yaitu Kelompok Harapan Bangsa Desa Gereba Kecamatan Cipaku;
- 2) Terfasilitasinya pengelolaan unggas dan aneka ternak sebanyak 1 unit untuk kelompok Nurul Huda Desa Sindangmukti Kecamatan Panumbangan serta terlaksananya perumusan kebijakan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang dituangkan dalam bentuk laporan sebanyak 1 dokumen.

B. Tugas Pembantuan yang diberikan

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak memberikan tugas pembantuan kepada Desa, namun demikian guna kelancaran dan mendukung kegiatan tugas pembantuan yang diterima terutama program dan kegiatan yang secara langsung menyentuh terhadap masyarakat, telah dialokasikan dana dari APBD Kabupaten Ciamis berupa dana pendamping program pusat dan provinsi yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Pada tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan beberapa kerjasama antar daerah, diantaranya kerjasama dalam penempatan transmigran dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Gorontalo dan Boalemo Provinsi Gorontalo serta kerjasama dengan 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang berbatasan, baik di wilayah Jawa Barat maupun Jawa Tengah yaitu Kabupaten Kuningan, Cirebon, Ciamis, Cilacap, Majalengka, Brebes serta Kota Cirebon dan Banjar yang terhimpun dalam sebuah lembaga kerjasama yaitu Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama, dimana pada tahun 2015 telah bertambah keanggotaannya sebanyak 1 (satu) Pemerintah Kabupaten yaitu Pangandaran. Kerjasama ini merupakan upaya masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinergitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Selain itu, atas fasilitasi BKAD Kunci Bersama, pada tahun 2016 telah disepakati kerjasama dalam penanganan bencana di wilayah perbatasan, sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terpadu, sistematis, cepat, akurat, terkoordinatif, berkesinambungan dan akuntabel, baik pada tahapan pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

Selanjutnya telah dilakukan pula kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Tasikmalaya guna mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan, diantaranya rencana pembangunan jembatan Benteng-Manonjaya, pembangunan bendungan Leuwikeris dan pembangunan akses jalan serta kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Priangan Timur dalam rangka mendukung pembangunan tematik kewilayahan. Berkenaan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dengan daerah provinsi yang berbeda, telah dilaksanakan kerjasama dalam penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di wilayah perbatasan Jawa Barat bagian Timur dan Jawa Tengah bagian Barat meliputi 14 Pemerintah Kabupaten dan 4 Kota yang secara teknis dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan didukung perangkat daerah lainnya.

Memperhatikan uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dinilai cukup intens dalam melakukan kerjasama antar daerah sebagai bentuk ketaatan yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, terutama pasal 363 yang mengamanatkan bahwa kerja sama antar daerah merupakan kerjasama wajib bagi daerah yang berbatasan serta memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola secara bersama serta adanya prinsip saling menguntungkan.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dilakukan pula dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, investasi dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan ketentuan di atas, telah sejalan dengan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, sebagaimana disebutkan dalam Misi 2 yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat”, dengan tujuan “meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah”, serta arah kebijakan yaitu peningkatan kapasitas aparat pemda di bidang kerjasama antar stakeholder pembangunan serta penyelenggaraan seminar, lokakarya sebagai upaya menjaring kemungkinan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan pihak ketiga pada tahun 2016 meliputi bidang sosial, pemerintahan, infrastruktur, lingkungan hidup, pendidikan, pertanian serta bidang ekonomi, antara lain :

1. Kerjasama dengan unsur akademisi/ perguruan tinggi seperti Universitas Galuh Ciamis, UNPAS, UNPAD, UNSIL, IPDN dan IPB, telah diperoleh beberapa hasil antara lain terlaksananya implementasi program pemerintah dalam penyelenggaraan program S1 kependidikan bagi guru dalam jabatan, tersedianya hasil kajian legislasi produk hukum dalam berbagai program pembangunan guna pengembangan daerah yang dapat diimplementasikan dan dijadikan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan; terfasilitasinya penguatan laboratorium pemerintahan melalui praktik lapangan, tersedianya hasil kajian/penelitian pengembangan kawasan/produk Pertanian Unggulan Daerah dan sebagainya;
2. Kerjasama dengan perorangan berupa kesepakatan kerjasama (MoU) dalam pemberian hak guna pakai bangunan MCK pasar, terminal dan sub terminal di Kecamatan Ciamis, Kawali dan Banjarsari, dengan hasil terkelola serta tercapainya target pendapatan dari retribusi MCK;
3. Kerjasama dengan PT. USADI Sistemindo Intermatika berupa fasilitasi implementasi pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang terhadap kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
4. Kerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam penatausahaan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sehingga pengelolaan keuangan di SKPD dan Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam pengolahan, pengkajian dan penyusunan serta analisis data dan indikator pembangunan Kabupaten Ciamis yang hasilnya dijadikan sebagai referensi bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan penetapan kebijakan daerah;
6. Kerjasama dengan Kodim 0613 Ciamis dalam rangka peningkatan produktivitas hasil pertanian, diperoleh hasil meningkatnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta lahan pertanian juga meningkatnya kapasitas dan kelembagaan petani serta terintegrasinya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian;
7. Kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional III Ciamis, diperoleh hasil tersedia dan tersalurkannya Raskin/Rastra sampai ke titik distribusi/Rumah Tangga Sasaran (RTS) serta terkoordinasikannya pengaturan dan pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) bagi Desa/Kelurahan se Kabupaten Ciamis;

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Sesuai Pasal 67 huruf g Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang dimaksud, bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati dibantu oleh instansi vertikal yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Gubernur.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2016 telah terbentuk beberapa forum koordinasi dan terlaksana interaksi kegiatan dengan instansi vertikal. Adapun forum dan hasil yang telah dicapai diantaranya sebagai berikut :

1. Koordinasi Pimpinan Daerah dilakukan secara insidentil membahas mengenai pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, penegakan hukum, terorisme, *trafficking*, antisipasi konflik SARA, pencegahan dan penanganan pembalakan hutan negara/konflik pertanahan serta berbagai rencana tindakan dan pencegahan terhadap masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Pejabat yang terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Kapolres Ciamis, Komandan Distrik Militer 0613 Ciamis dan Ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Hasil yang dicapai antara lain terwujudnya dan terpeliharanya kondusifitas daerah yang mendukung terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Ciamis.
2. Koordinasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Ciamis dengan materi mengenai perencanaan, pencarian, pengumpulan dan mengkomunikasikan bahan/keterangan Intelegen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di daerah. Instansi vertikal yang terlibat antara lain unsur Polres Ciamis, Kodim 0613 Ciamis, Kejaksaan Negeri Ciamis, Sub Den Pom Ciamis dan Kantor Imigrasi Tasikmalaya. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya deteksi dini pencegahan konflik dalam mendukung stabilitas Ipoleksosbudhankam yang kondusif;
3. Forum Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Ciamis yang melibatkan unsur Polres Ciamis, Kodim 0613 Ciamis dan Kejaksaan Negeri Ciamis. Koordinasi ini dilaksanakan secara insidentil untuk menyikapi issue-isue faktual yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil yang dicapai adalah terciptanya kewaspadaan dini masyarakat;
4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Fasilitasi Kegiatan Pembauran Bangsa dengan materi mengenai pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Ciamis yang melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Ciamis, Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, Kodim 0613 Ciamis dan Polres Ciamis. Hasil yang dicapai adalah terciptanya stabilitas dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Ciamis;
5. Koordinasi Sistem Pengawasan Orang Asing (SIPORA) dengan materi koordinasi berupa sinkronisasi atau sinergitas antar institusi/instansi pemerintahan tingkat pusat dan daerah dalam rangka memelihara stabilitas dan kepentingan Nasional dari dampak negatif yang kemungkinan besar akan timbul, sebagai akibat adanya perlintasan orang antar negara serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah NKRI khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis. Instansi vertikal yang terlibat adalah unsur Kantor Ditjen Keimigrasian Tasikmalaya, Polres Ciamis, Kodim 0613 Ciamis dan Kejaksaan Negeri Ciamis. Hasil yang dicapai adalah terawasi dan termonitornya kegiatan-kegiatan orang asing serta teridentifikasinya jumlah dan penyebaran orang asing di Kabupaten Ciamis;
6. Koordinasi Pemeliharaan Kantrantibmas, mengenai pelaksanaan piket perbatasan Jabar-Jateng dan penciptaan kondisi trantibum di daerah yang melibatkan unsur Polres Ciamis, Kodim 0613 Ciamis, Sub Den Pom Ciamis dan Zipur Ciamis. Hasil yang dicapai adalah terjalinnya sinergitas dan terwujudnya penanganan trantibum di wilayah perbatasan;
7. Koordinasi Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat dengan materi mengenai penanganan unjuk rasa serta penertiban orang gila dan terlantar yang melibatkan Polres Ciamis. Hasil yang dicapai adalah terkendalinya kebisingan dan gangguan masyarakat serta ketertiban pelaksanaan unjuk rasa sehingga sinergitas penanganan trantibum di Daerah semakin meningkat;

8. Koordinasi lalu lintas dan angkutan mengenai pemeriksaan kendaraan di jalan raya, pembinaan dan pengawasan juru parkir, pengamanan Hari Raya dan Tahun Baru serta Wahana Tata Nugraha (WTN) yang melibatkan Polres Ciamis dengan hasil antara lain terlaksananya pengamanan di jalan raya secara terkoordinasi dan diraihnya penghargaan WTN;
9. Koordinasi Pengendalian Keamanan Lingkungan yang melibatkan Polres Ciamis, Polsek Ciamis, Kodim 0613 Ciamis dan Koramil Ciamis mengenai pembongkaran kios PKL yang melanggar aturan yang berlaku, dengan hasil adanya sinergitas penanganan trantibum di daerah;
10. Koordinasi mengenai bantuan hukum berupa jasa pengacara bagi masyarakat tidak mampu yang melibatkan Pengadilan Negeri Ciamis, dengan hasil terlaksananya pemberian jasa pengacara bagi masyarakat tidak mampu sebanyak 6 orang dan terciptanya keadilan secara proporsional;
11. Koordinasi penyuluhan hukum yang melibatkan Pengadilan Negeri Ciamis mengenai undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang lalu lintas, dengan hasil terpublikasikannya peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum;
12. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang melibatkan Badan Pusat Statistik dan Sub Dolog Wilayah VII Ciamis mengenai ketersediaan pangan, distribusi pangan, kewaspadaan pangan, pencegahan serta pengawasan pangan dan gizi, dengan hasil meningkatnya koordinasi dan kinerja Dewan Ketahanan Pangan dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan;
13. Koordinasi Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Haji yang melibatkan Kementerian Agama, dengan hasil terselenggaranya pemeriksaan calon haji sebanyak 158 orang sebagai catatan medis pasien.

D. Pembinaan Batas Wilayah.

Batas wilayah Kabupaten Ciamis dengan kabupaten/kota tetangga yang berbatasan, *alhamdulillah* hingga saat ini tidak pernah terjadi permasalahan maupun konflik, karena hubungan koordinasi yang harmonis dan kerjasama antar daerah telah terjalin dengan baik, sebagaimana diuraikan pada pembahasan kerjasama antar daerah.

Demikian pula dilihat dari aspek yuridis berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penegasan batas daerah terutama dengan daerah di wilayah utara, telah ditetapkan pilar batasnya secara jelas, karena hal tersebut memang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun berkaitan dengan batas daerah dengan kabupaten/kota di wilayah Selatan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, telah berdampak terhadap adanya perubahan batas daerah antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan batas Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, dimana hingga saat ini Permendagri yang mengatur segmen batas daerah dimaksud sedang dilakukan pembahasan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah serta Pemerintah Pusat.

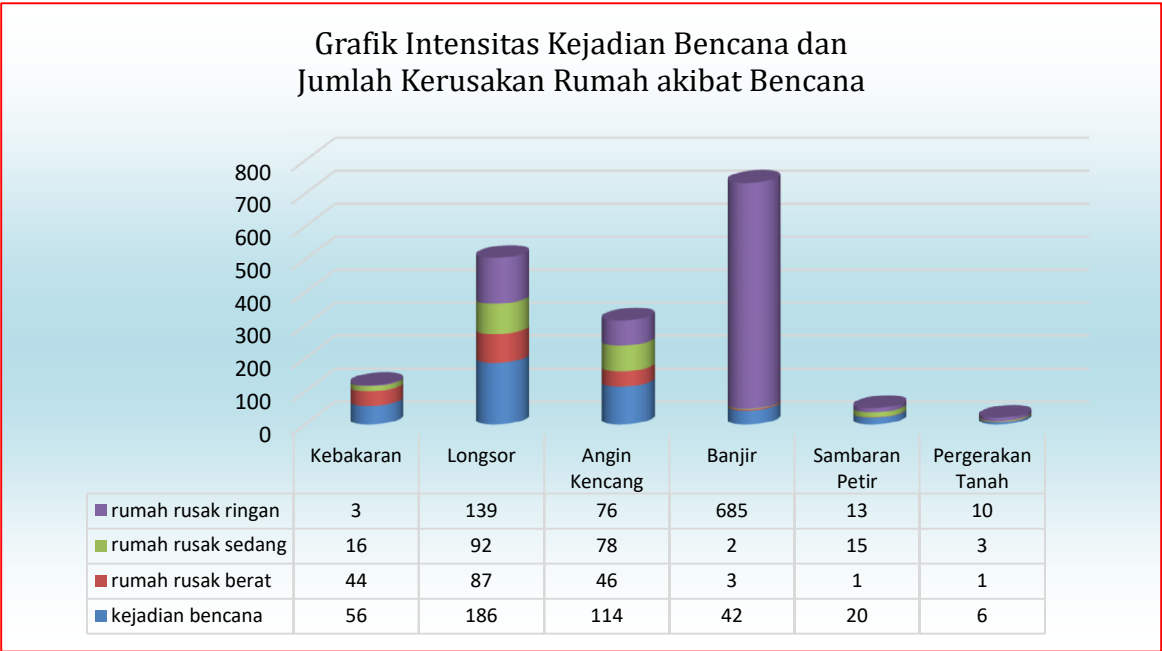
Selain penegasan batas daerah, hal perlu diperhatikan adalah upaya masing-masing pemerintah daerah dalam menjaga, mengelola dan membangun wilayah perbatasan. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan berbagai kegiatan secara swakelola maupun difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, diantaranya rapat-rapat koordinasi maupun pertemuan lintas batas yang membahas mengenai pemeliharaan kantrantibmas, pengendalian mobilitas penduduk, sinkronisasi program dan upaya penanganan konflik lintas batas serta identifikasi permasalahan di perbatasan terutama mengenai kesenjangan dan ketimpangan pelayanan publik di wilayah perbatasan, pemaduserasian perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan dan peningkatan kerjasama antar daerah.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan indeks rawan bencana Indonesia dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Ciamis berada pada urutan ke 16 tingkat Nasional dan urutan ke 5 tingkat Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya sesuai RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, Kabupaten Ciamis dinyatakan rawan akan bencana gempa bumi, gerakan tanah dan banjir. Berkenaan dengan adanya potensi gempa, hal ini dikarenakan wilayah Ciamis berada di bagian Selatan yang dilalui oleh 2 (dua) lempengan pertemuan antara Indo Australia dengan Eurasia. Selain itu, menurut sejarah dan fakta geomorfologi tentang letak Kabupaten Ciamis yang dilalui gerakan jalur sesar aktif atau zona gempa bumi tersebut, diketahui bahwa skala intensitas atau gelombang gempa bumi yang beberapa kali terjadi termasuk gempa berkekuatan sedang.

Adapun berkaitan dengan potensi longsor akibat gerakan tanah, sesuai peta zona kerentanan tanah bahwa seluruh kecamatan memiliki potensi tersebut, akan tetapi area yang termasuk ke dalam zona tinggi berada di Kecamatan Panawangan, Sukamantri, Rancah, Tambaksari, Cidolog, Pamarican dan Banjarsari, sedangkan kawasan yang teridentifikasi rawan banjir berada di Kecamatan Cijeungjing, Cisaga, Pamarican, Banjarsari dan Purwadadi

Berdasarkan catatan pelaporan kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2016, telah terinventarisir diantaranya kebakaran sebanyak 56 kasus, tanah longsor sebanyak 186 kasus, angin kencang/putting beliung sebanyak 114 kasus dan banjir sebanyak 42 kasus, sambaran petir sebanyak 20 kasus dan pergerakan tanah sebanyak 6 kasus sedangkan bencana akibat gempabumi tidak ada. Dampak dari kejadian bencana ini telah mengakibatkan taksiran kerugian harta benda sebesar Rp. 15,002 Milyar serta jumlah rumah rusak/terkena dampak sebanyak 1.295 unit dengan kriteria rusak ringan, sedang dan berat. Untuk mengetahui intensitas kejadian dan dampak kerusakan akibat bencana, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana di atas, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyalurkan bantuan sosial penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Ciamis yang disampaikan kepada 569 penerima sebesar Rp. 1,2 Milyar. Selain itu dilaksanakan pula penanganan bencana diantaranya melalui penyediaan logistik berupa sembako sebanyak 1.400 paket, karung sebanyak 1.000 buah dan bronjong sebanyak 300 buah.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, telah dilakukan pula upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan diantaranya melalui penyebaran informasi potensi kebencanaan melalui kegiatan Desa Tangguh dan Sekolah Siaga Bencana bekerjasama dengan BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat serta pelatihan teknis pencegahan/kesiapsiagaan bencana bersama masyarakat.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Sesuai Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebanyak 14 jenis kawasan yang penetapannya dapat diusulkan oleh Menteri dan atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Gubernur dan Bupati/Walikota, namun hingga saat ini belum ada kawasan khusus yang ditetapkan dan menjadi kewenangan Kabupaten Ciamis.

Berkenaan dengan bagian dari kawasan yang bersifat khusus adalah kawasan hutan konservasi dan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa salah satu jenis kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan suaka alam, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), termasuk di dalamnya Kawasan Suaka Margasatwa. Kawasan Hutan Gunung Sawal di Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/Kpts/Um/1979 tanggal 4 Juli 1979 dengan luas 5.400 Ha. Adapun pengelolaan dan kewenangannya saat ini adalah pada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

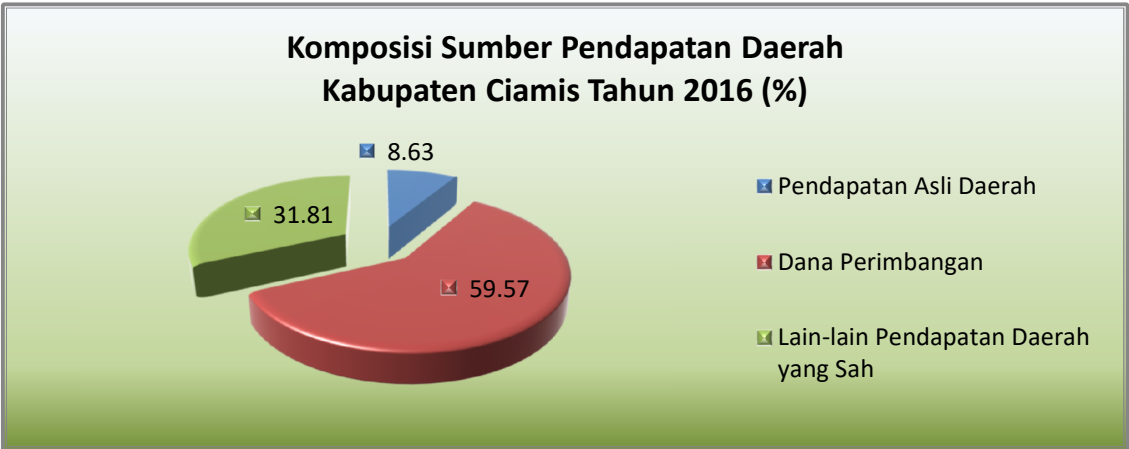
Selama Tahun 2016, kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ciamis dirasakan tetap kondusif. Hal ini merupakan peran Pemerintah Kabupaten Ciamis didukung oleh aparat keamanan dari TNI dan Polri serta partisipasi masyarakat yang senantiasa berupaya menjaga serta meningkatkan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Adapun dalam penanganan dan penanggulangan kejadian maupun penertiban, senantiasa dilakukan secara persuasif dan rutin, sehingga pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Beberapa hasil yang dicapai dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban antara lain terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru; terlaksananya kegiatan penertiban PSK sebanyak 41 orang, PGOT sebanyak 161 orang dan PAM keramaian massa sebanyak 28 kali; terlaksananya kegiatan pengamanan/penjagaan aset daerah sebanyak 739 kali, patroli kota 732 kali serta penertiban PKL 61 kali dan terlaksananya Diklat Linmas sebanyak 39 kali bagi 1.170 orang

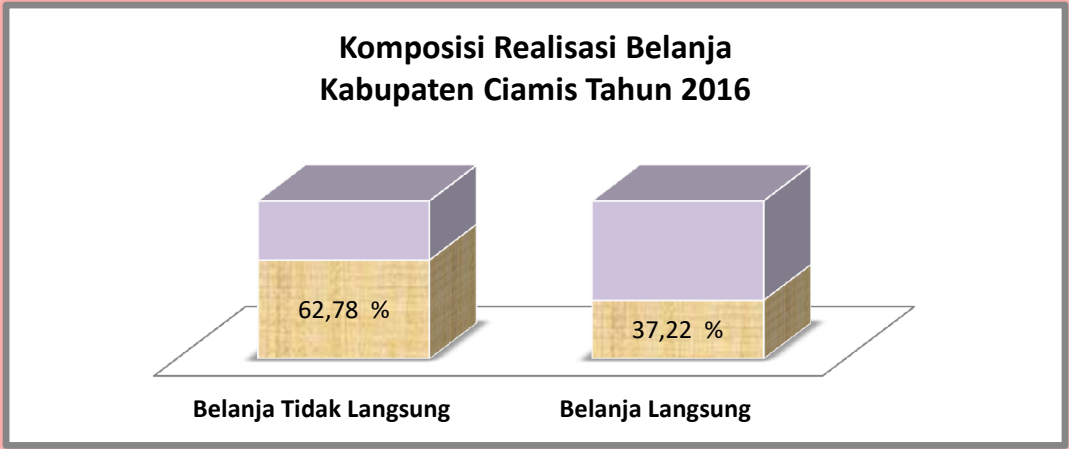
H. Hal-hal Lain yang perlu untuk dilaporkan

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1. Pendapatan tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 2.512.478.052.246,00, terealisasi sebesar Rp. 2.372.854.213.034,60 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 204.759.434.819,60, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.413.397.717.898,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 754.697.060.317,00. Adapun komposisi terhadap masing-masing sumber pendapatan tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Belanja tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 2.647.585.765.822,00 terealisasi sebesar Rp. 2.460.806.671.948,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.544.894.695.835,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 915.911.976.113,00. Adapun komposisi masing-masing belanja dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



3. Penerimaan Pembiayaan tahun 2016 dari target sebesar Rp. 160.584.468.595,00 terealisasi sebesar Rp. 115.584.468.595,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan dari target sebesar Rp. 25.476.755.019,00 terealisasi sebesar Rp. 18.986.745.492,00 sehingga pembiayaan netto dari target sebesar Rp. 135.107.713.576,00 terealisasi sebesar Rp. 96.597.723.103,00;

Selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa selama Tahun 2016, Kabupaten Ciamis telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan, baik tingkat Nasional maupun Provinsi, diantaranya Piala Adipura Kirana di bidang kebersihan kota, Piala Wahana Tata Nugraha di bidang tertib lalu lintas, Dana Rakca 2016 yaitu Penghargaan Presiden RI untuk daerah berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan, dilanjutkan Penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas keberhasilannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah serta Penghargaan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, atas upaya membina dan mengembangkan Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten yang Peduli Hak Asasi Manusia.

Prestasi lainnya yaitu Penghargaan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI kepada Bupati yang berintegritas dalam peranserta dan kinerjanya pada Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah; Penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Daerah atas Peran Aktif dalam Program Reforma Agraria, Penghargaan “Manggala Karya Kencana” dari Kepala BKKBN atas Prestasi yang menonjol dan komitmen serta kepemimpinannya dalam menggerakkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Adapun Penghargaan Tingkat Provinsi Jawa Barat, telah diraih lebih dari 30 (Tiga Puluh) Prestasi yang merupakan dedikasi putra putri terbaik Ciamis, diantaranya Juara Umum Porsadin; Juara I Lomba Kelompok Agribisnis atas Nama Kelompok Tani Mekar Desa Kertajaya Kecamatan Panumbangan; Posyandu Terbaik Atas Nama Posyandu Permata Desa Situmandala Kecamatan Rancah; Kader Posyandu Terbaik atas Nama Eva Safariah Posyandu Tulip Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya; Juara I Kompetisi Sains Madrasah Bidang PAI atas Nama Adza Hifhul Haq; Peringkat I Pramuka LT. IV atas Nama MTsN 13 Rajadesa; Peringkat I Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) atas Nama Hajjah Ai Elah Syam Arifin serta Peringkat I Lomba Kreativitas Produk Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kategori Kreativitas Kerajinan Tangan Goodybag Ekonomis atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan lain-lain.

Kami sangat bersyukur, karena apabila memperhatikan deretan trofi dan penghargaan di atas, terlihat jelas dan nyata bahwa Kabupaten Ciamis tidak tidur dari prestasi dan tidak diam dalam membangun, akan tetapi terus menampilkan kemampuannya dalam setiap momen dan hal ini dapat dijadikan bukti konkrit bahwa Ciamis Manis sekarang merupakan daerah yang eksis, berdaya saing dan semakin maju.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran eksekutif, legislatif, unsur Forkopimda, unsur instansi vertikal, BUMN dan BUMD beserta seluruh komponen masyarakat Tatar Galuh Ciamis yang telah menjalin kebersamaan dan kekompakan, bekerja keras serta berperan aktif mencurahkan tenaga dan pikiran dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis, semoga apa yang telah dilakukan dijadikan amal ibadah yang berlipat ganda, aamiin. Selanjutnya pada kesempatan ini pula kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dan atau capaian hasil kinerja yang belum optimal, akan tetapi kami bertekad dan berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan serta melanjutkan pembangunan guna terwujudnya Ciamis maju berkualitas, masyarakat yang mandiri dan sejahtera serta pemerintahan yang selaras.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 yang dapat kami sajikan, semoga bermanfaat.

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN